

TESIS

**PENYIDIKAN TERHADAP PENGUSAHA ATAS DUGAAN TINDAK
PIDANA KETENAGAKERJAAN DALAM BIDANG UPAH DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2023**

TESIS
PENYIDIKAN TERHADAP PENGUSAHA ATAS DUGAAN TINDAK
PIDANA KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
Karenina Cantiga, 2120112014, Magister Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Andalas

ABSTRAK

Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha atau pihak di luar perusahaan yang ancaman sanksinya berdasarkan KUHP, Undang-undang ketenagakerjaan, dan/atau Undang-Undang lainnya, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Salah satu tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yaitu mengenai upah minimum, dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 4 Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp400.000.000,. Pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, untuk terlaksananya hukum ketenagakerjaan tersebut maka Undang-undang mengatur mengenai penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah, pertama. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatera Barat dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan di bidang upah?. Kedua. Bagaimana koordinasi penyidikan pidana ketenagakerjaan antara PPNS Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Sumatera Barat dengan Penyidik Kepolisian?, dan ketiga. Apasaja Kendala PPNS Ketenagakerjaan sehingga kinerjanya tidak maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama. Sebelum dilakukannya penyidikan, PPNS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan, selanjutnya yaitu pemeriksaan, pemeriksaan terdiri atas 4 yaitu: pemeriksaan pertama, berkala, khusus dan pemeriksaan ulang. Jika terdapat temuan tindak pidana salah satunya di bidang pengupahan maka PPNS Ketenagakerjaan wajib membuat nota pemeriksaan I dan nota pemeriksaan II jika tidak berhasil maka selanjutnya PPNS Ketenagakerjaan akan membuat Laporan Kejadian untuk mendapatkan surat tugas yang berguna untuk penyelidikan berlangsung. Kedua penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan Korwas polri, koordinasi PPNS Ketenagakerjaan dengan Korwas polri yaitu pada saat penangkapan langsung, penggeledahan, dan melakukan penahanan. Ketiga, Masih adanya tumpang tindih dari UU terkait upah, kurangnya biaya, masih kurangnya administrasi evaluasi dari pemerintahan

Kata Kunci : Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Upah

THESIS
INVESTIGATION OF EMPLOYERS FOR ALLEGED LABOR CRIMES IN
THE FIELD OF WAGES IN WEST SUMATRA PROVINCE

Karenina Cantiga, 2120112014, Master of Law, Faculty of Law, University of
Andalas

ABSTRACT

Criminal acts in the field of labor are unlawful acts committed by workers, employers or parties outside the company who are threatened with criminal sanctions based on the Criminal Code, labor laws, and/or other laws, either carried out individually or together. One of the crimes in the field of labor is regarding the minimum wage, with the threat of criminal witnesses imprisonment for a minimum of 1 year and a maximum of 4 years and/or a fine of at least Rp. 100,000,000 and a maximum of Rp. 400,000,000. Wages are regulated in Law Number 6 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, for the implementation of the labor law, the Law regulates Civil Servant Officer (PPNS) investigators who are specifically authorized by law to conduct investigations. The formulation of the problem discussed in this study is, first. How is the implementation of the investigation carried out by the PPNS of the West Sumatra Manpower and Transmigration Office in the field of Labor Crimes? Second. How is the coordination of labor criminal investigations between the PPNS of the West Sumatra Manpower and Migration Office and Police Investigators?, and third. What are the constraints of PPNS Employment so that its performance is not optimal. The research method used is empirical juridical, the data collection technique used is an interview. The results showed that: First. Before the investigation, PPNS Employment conducts coaching, the next is the examination, the examination consists of 4 namely: first, periodic, special and re-examination. If there are findings of criminal acts, one of which is in the field of wages, PPNS Employment must make an examination note I and examination note II, if unsuccessful, then PPNS Employment will make an Event Report to obtain a letter of assignment that is useful for the ongoing investigation. The two investigations carried out by PPNS under the coordination and supervision of the National Police Corps, the coordination of the Employment PPNS with the National Police Corps, namely during direct arrests, searches, and detentions. Third, there is still overlap of laws related to wages, lack of costs, lack of administrative evaluation from the government

Keywords : Investigation, Civil Servant Investigator, Labor Crime, Wages